

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip dalam penyusunan LAKIP. Pertama, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat kegagalan maupun keberhasilan. Kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. Ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Skala Penilaian

Skala Nilai	Kategori Nilai
≥ 100	Sangat Baik
80 - 99	Baik
55 - 79	Sedang
≤ 54	Kurang

B. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Adapun pencapaian kinerja terhadap target indikator kinerja BPBD Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian 2017
			2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan	a. Persentase menurunnya kejadian bencana	5%	41 kejadian	51 kejadian	135 kejadian	-297,06 %
	b. Jumlah kelurahan tangguh bencana	5 kelurahan	-	3 kelurahan	5 kelurahan	100%

masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	di Kota Malang					
	c. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	75%	-	74,56%	82%	109,33%
b. Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	a. Rata – rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	1,54 jam	< 1 jam	100%
	b. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
c. Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	a. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	25%	28,6%	25%	31,5%	126%
	b. Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	25%	-	25%	37,5%	150%
	c. Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	-	34,53%	85,3%	170,6%

Adapun evaluasi dan analisis mengenai pencapaian kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

TUJUAN PERTAMA

Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Sasaran Strategis : Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana.

Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

- Persentase Menurunnya Kejadian Bencana, dan
- Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang
- Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana.

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dari misi pertama BPBD Kota Malang Tahun 2017 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2017
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% (34 kejadian)	-297,06% (135 Kejadian)	-297,06%
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	5 kelurahan	5 kelurahan	100%
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	75%	82%	109,33%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% (38 kejadian)	-7,89% (41 kejadian)	5% (36 kejadian)	-41,66% (51 kejadian)	5% (34 kejadian)	-297,06% (135 Kejadian)
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	3 kelurahan	- (0%)	3 kelurahan	3 kelurahan (100%)	5 kelurahan	100%
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	80%	- (0%)	80%	74,56% (93,2%)	75%	82% (109,33%)

Indikator Pertama

Persentase menurunnya kejadian bencana

Target 34 kejadian pada tahun 2017 sebagaimana tabel 3.2 didapatkan dari Renstra BPBD, dimana kondisi awal untuk menghitung penurunan kejadian sebesar 5% per tahun adalah kejadian bencana tahun 2014, yaitu 40 kejadian.

$$\begin{aligned}\text{penurunan kejadian per tahun} &= \frac{5}{100} \times 40 \text{ kejadian} \\ &= 2 \text{ kejadian}\end{aligned}$$

Sehingga target kejadian secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

INDIKATOR 1	KONDISI AWAL	TARGET PENURUNAN			
		2015	2016	2017	2018
Persentase menurunnya kejadian bencana	40 Kejadian	5% (38 kejadian)	5% (36 kejadian)	5% (34 kejadian)	5% (32 kejadian)

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target dalam menurunkan kejadian bencana. Angka kejadian bencana yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah 34, namun dalam realisasinya naik sebanyak 101 kejadian dari target yang ditentukan, yaitu menjadi 135 kejadian. Sehingga capaian kinerja dari indikator ini menjadi:

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian kinerja} &= \frac{\text{penurunan kejadian}}{\text{target kejadian}} \times 100\% \\ &= \frac{-101}{34} \times 100\% \\ &= -297,06\%\end{aligned}$$

Dari tabel 3.3, jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2016, kejadian di tahun 2017 mengalami kenaikan yang lebih tinggi sehingga terjadi penurunan capaian kinerja. Hal ini bukan serta merta disebabkan karena gagalnya BPBD dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, namun tingginya angka kejadian bencana di Kota Malang disebabkan karena bencana tersebut tidak dapat diprediksi dan ada beberapa hal yang mempengaruhinya, antara lain:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Malang. Dahulu masyarakat masih merasa enggan untuk melaporkan kejadian bencana dikarenakan dirasa belum adanya tindak lanjut terhadap laporan kejadian bencana. Namun saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan kejadian bencana lebih meningkat dikarenakan sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa di Kota Malang telah ada BPBD yang memiliki tugas pokok dalam upaya penanggulangan bencana;
- Adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat dalam pelaporan kejadian bencana, sehingga saat terdapat kejadian bencana masyarakat dapat langsung melaporkan ke contact center Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
- Terjadinya perubahan iklim sejak tahun 2016 yang menyebabkan cuaca ekstrim di Kota Malang yang memicu banyak kejadian banjir dan tanah longsor di beberapa titik rawan bencana;
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Kurangnya respon dari *stakeholder* terhadap rekomendasi hasil kajian pengurangan risiko bencana serta kurangnya tindak lanjut dari hasil pemantauan daerah yang berpotensi rawan bencana.

Indikator Kedua

Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang

Berdasarkan table 3.2 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja 100%. BPBD Kota Malang telah melakukan inisiasi pembentukan 5 (lima) kelurahan tangguh bencana. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh partisipasi dari masyarakat serta perangkat kelurahan sehingga pelaksanaan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh dapat berjalan dengan lancar.

Pada table 3.3 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang mengalami peningkatan kinerja yang sangat baik, seperti halnya pada tahun 2016 target pembentukan kelurahan tangguh bencana dapat terealisasi dengan baik. Pembentukan kelurahan tangguh ini tidak lepas dari sudah dialokasikan kedalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan yang memfasilitasi pembentukan kelurahan tangguh bencana pada tahun 2017.

Indikator Ketiga

Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 109,33%. Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan oleh BPBD sebanyak 2 (dua) kali. Survey pertama untuk semester I tahun 2017 dilakukan pada bulan Juli s/d Agustus 2017, sedangkan survey kedua untuk semester II tahun 2017 dilakukan pada bulan Januari 2018. Hasil survey pertama menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 81% dengan kategori nilai Baik. Sedangkan hasil survey kedua menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 83% dengan kategori nilai Baik. Sehingga untuk nilai SKM tahun 2017 dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{SKM 2016} &= \frac{\text{SKM semester 1} + \text{SKM semester 2}}{2} \\
 &= \frac{81\% + 83\%}{2} \\
 &= 82\%
 \end{aligned}$$

Nilai SKM yang didapatkan tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditentukan. Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Telah adanya payung hukum tentang pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Malang, sehingga telah terdapat aturan yang jelas dalam pelaksanaan kerjasama antar *stakeholder* terkait kebencanaan;
- Dilaksanakannya sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait dan dibentuknya beberapa kelurahan tangguh bencana di Kota Malang, sehingga pemahaman tentang penanganan bencana di Kota Malang menjadi lebih baik;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi terkait informasi kebencanaan dalam sosial media yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga seluruh masyarakat Kota Malang dapat mengetahui *update* berita kebencanaan dan dapat melaporkan kejadian bencana yang terjadi dengan lebih cepat;
- Tercapainya target kinerja waktu tanggap bencana yang kurang dari 1 jam, sehingga korban bencana lebih cepat mendapatkan penanganan;
- Tercapainya target kinerja pemberian logistik dan evakuasi terhadap seluruh korban bencana;
- Tercapainya target kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi fisik serta non fisik pasca bencana;

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa tahun 2017 BPBD Kota Malang mengalami kemajuan yang signifikan dalam pencapaian kinerja indikator keempat jika dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan kinerja ini didukung dengan kerjasama yang baik dari seluruh komponen BPBD, sehingga kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat direspon dengan baik oleh masyarakat Kota Malang.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pertama s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi			Tingkat Kemajuan
				2015	2016	2017	
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% per tahun (32 kejadian)	-7,89% (41 kejadian)	-41,66% (51 kejadian)	-297,06% (135 Kejadian)	-321,88%
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	12 kelurahan	-	3 kelurahan	5 Kelurahan	66,67%
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	75%	-	74,56%	82%	109,33%

Berdasarkan tabel 3.4, pada indikator kinerja pertama terlihat bahwa BPBD Kota Malang mengalami persentase tingkat kemajuan realisasi kinerja yang terhitung minus. Namun dengan peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait serta penambahan sarana prasarana terkait penanggulangan bencana pada tahun mendatang diharapkan BPBD dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan dapat mencapai kinerja sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Sedangkan pada indikator kedua, BPBD Kota Malang mengalami tingkat kemajuan yang baik dengan pencapaian target jangka menengah sebesar 66,67%. Sehingga untuk mencapai target 12 kelurahan tangguh pada akhir periode Renstra, BPBD Kota Malang menambahkan angka target tahunan menjadi 5 kelurahan di tahun selanjutnya.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	269.275.000	4,17%
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	437.525.000	6,78%
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	906.020.000	14,05%

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 4,17%, untuk indikator kedua adalah 6.78%, dan untuk indikator ketiga adalah 14,05%. Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 6.450.000.000,- .

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Pertama

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5%	135 kejadian	-297,06%	269.275.000	188.302.500	69,93%
	Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	437.525.000	369.791.750	84,52%
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	74,56%	82%	109,33%	906.020.000	854.117.020	94,27%
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	5%	15,04%	300,8%	706.800.000	585.094.250	82,78%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai	100%	98,61%	98,61%	1.253.929.000	1.112.935.420	83,59%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76	-	-	427.400.000	389.298.500	91,09%

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah -297,06% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 69,93%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian anggaran, hal ini dikarenakan adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 84,52%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 109,33% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 94,27%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran.

Pada bagian program dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase masyarakat tangguh bencana dengan target sebesar 15,04%. Realisasi target tersebut dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{\text{Jumlah masyarakat di kelurahan tangguh bencana}}{\text{Jumlah total masyarakat Kota Malang}} \times 100\%$$

Data jumlah penduduk total masyarakat Kota Malang dan jumlah penduduk masing-masing kelurahan tangguh bencana adalah sebagai berikut:

No	Kota/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sumber Data
1.	Kota Malang	895.387	Kota Malang dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang
2.	Kelurahan Tlogomas	13.435	Website Resmi Kelurahan Tlogomas (https://keltlogomas.malangkota.go.id)
3.	Kelurahan Penanggungan	29.378	Website Resmi Kelurahan Tlogomas (https://keltlogomas.malangkota.go.id)
4.	Kelurahan Bandungrejosari	30.133	Website Resmi Kelurahan Bandungrejosari (https://kelbandungrejosari.malangkota.go.id)
5.	Kelurahan Kedungkandang	33.867	Website Resmi Kelurahan Bandungrejosari (https://kelkedungkandang.malangkota.go.id)

6.	Kelurahan Pandanwangi	27.868	Website Resmi Kelurahan Pandanwangi (https://kelpandanwangi.malangkota.go.id)
Jumlah Masyarakat Tangguh Bencana di Kota Malang adalah 134.681 jiwa			

Dari data tersebut, dapat dihitung pencapaian target indikator program sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi target} &= \frac{134.681 \text{ jiwa}}{895.387 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ &= 15,04 \%\end{aligned}$$

Dari hasil realisasi target tersebut, didapatkan pencapaian kinerja program tersebut adalah 300,8%, sedangkan pencapaian anggarannya adalah sebesar 82,78%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja program tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran dan termasuk dalam kriteria nilai yang sangat baik.

Pada bagian program pendukung indikator ketiga, terdapat dua program yang menunjang pencapaian target kinerja tersebut, yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun penjelasan dari masing-masing pencapaian program secara rinci adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah persentase tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai. Pencapaian target tersebut dapat dilihat dari jumlah sarana prasarana kantor yang dimiliki dibagi jumlah sarana prasarana kantor yang dibutuhkan dikalikan dengan 100%. Data rekap pengadaan pada program ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

No	Kegiatan	Indikator	Target (yang dibutuhkan)	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5 jenis (pagar keliling, tempat parkir, front office, balkon gedung kantor, atap tempat parkir)	4 jenis (tempat parkir, front office, balkon gedung kantor, atap tempat parkir)
2.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor operasional yang dibeli	1 unit mobil pick up dan 2 unit sepeda motor roda dua	1 unit mobil pick up dan 2 unit sepeda motor roda dua
3.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	10 jenis	10 jenis
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	2 unit mobil dan 4 unit motor	2 unit mobil dan 4 unit motor
6.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pelaksanaan service perlengkapan gedung kantor	1 kali	1 kali
7.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	Jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	27 jenis barang modal, 11 jenis pakaian kerja, & 8 jenis bahan/ material	27 jenis barang modal, 11 jenis pakaian kerja, & 8 jenis bahan/ material
TOTAL			72 jenis	71 jenis

Dari data dalam tabel tersebut, maka realisasi target program dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi target} &= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana kantor yang dimiliki}}{\text{jumlah sarana prasarana kantor yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{71}{72} \times 100\% \\
 &= 98,61\%
 \end{aligned}$$

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah hasil evaluasi SAKIP SKPD. Pencapaian target tersebut belum dapat dituliskan karena penilaian SAKIP BPBD Kota Malang tahun 2017 masih dalam proses.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	-297,06	69,93%	-366,99
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	100%	84,52%	15,48
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	109,33%	94,27%	15,06

Berdasarkan tabel 3.7, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah -366,99%. Tingkat efisiensi pencapaian kinerja ini memang memiliki nilai minus yang besar, namun bukan berarti bahwa BPBD Kota Malang tidak melaksanakan tugas dengan baik. BPBD Kota Malang pada dasarnya telah berupaya melakukan penghematan anggaran senilai Rp. 80.972.500,- dalam pelaksanaan kinerja ini, namun karena adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya, pencapaian kinerja pada indikator ini menjadi minus.

Pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 15,48%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 67.733.250,-. Meskipun telah melakukan penghematan anggaran, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan yang sangat baik yaitu 100%.

Pada indikator ketiga terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 15,06%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 51.902.980,-. Meskipun telah melakukan penghematan anggaran, namun dalam pencapaiannya tetap dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja pada sasaran pertama, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program ini telah diuraikan pada tabel 3.6. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1.1. Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko Bencana;
 - 1.2. Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana;
 - 1.3. Pemantauan untuk Pencegahan Bencana;
 - 1.4. Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko;
 - 1.5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Penjelasan tentang pencapaian program ini telah diuraikan pada tabel 3.6. Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pertama, yaitu:
 - 3.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penjelasan tentang pencapaian program ini telah diuraikan pada tabel 3.6. Dalam program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pertama, yaitu:

- 4.1. Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang - undangan untuk Penanggulangan Bencana
- 4.2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana
- 4.3. Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penunjang Indikator Pertama

Persentase menurunnya kejadian bencana

1. Kegiatan Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana

Kegiatan Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan secara Swakelola dengan menggunakan jasa tenaga ahli dari Universitas Brawijaya. Risiko bencana itu sendiri adalah besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam penyusunan kajian ini BPBD Kota Malang merangkul beberapa SKPD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, UPT Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, dan perwakilan dari masing-masing kecamatan di Kota Malang.

Dalam kegiatan Penyusunan Kegiatan Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana menghasilkan keluaran (*output*) diantaranya Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary* serta *Soft Copy* Laporan akhir. Dengan adanya kegiatan tersebut memiliki manfaat untuk perencanaan penanggulangan bencana di Kota Malang, sebagai pedoman untuk meminimalisir terjadinya kejadian bencana. Kegiatan

pengurangan risiko bencana terdapat kendala diantaranya kurangnya peta skala sampai dengan tingkat jalan serta wilayah topografinya daerah rawan bencana sulit dijangkau.

2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana

Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana dilaksanakan dengan melibatkan Perguruan Tinggi seperti Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi terkait penyebaran informasi dan potensi bencana yang dilaksanakan sebanyak dua kali. Kegiatan ini dilaksanakan bersama kelurahan serta komunitas di Malang Raya. Terselenggaranya kegiatan tersebut selalu didukung penuh oleh para relawan atau komunitas serta masing-masing kelurahan tangguh. Harapan dari terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi dan potensi bencana diantaranya :

- Mengenalkan pada masyarakat Kota Malang yang kaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Malang;
- Masyarakat Kota Malang akan lebih berpartisipasi dalam Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana;
- Diharapkan masyarakat Kota Malang dapat memahami bahwa Kesiapsiagaan dan Pencegahan bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, namun tanggung jawab bersama.

3. Kegiatan Pemantauan untuk Pencegahan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau titik rawan dan titik yang berpotensi terjadi bencana. Pemantauan ini dilaksanakan oleh non PNS yang tersebar di beberapa titik-titik yang telah ditentukan. Petugas pemantauan menghimpun data dengan meminta laporan dari pemerintah kelurahan setempat dan berkeliling di titik rawan dalam wilayah kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya. Masing-masing anggota tim pemantau wajib melakukan monitoring terhadap 8 titik rawan bencana setiap bulannya. Laporan bulanan dimasing-masing wilayah kelurahan terkait dengan potensi

wilayah yang rentan terjadinya bencana disertai foto-foto pendukung kondisi terkini dari titik yang dipantau. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pelaksana BPBD Kota Malang.

Selanjutnya hasil laporan monitoring titik rawan bencana dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait tindakan pencegahan bencana. Selain itu, dilakukan himbuan kepada kelurahan dan masyarakat terkait adanya titik-titik rawan bencana. Namun sejauh ini terdapat beberapa kendala dalam kegiatan pemantauan, antara lain sulitnya medan atau tempat yang akan dijangkau untuk dilakukan pemantauan.

4. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Multipihak Dalam Pengurangan Risiko

Peningkatan kerjasama multipihak yang diselenggarakan bekerjasama dengan AIPTINAKES, SAR Trenggana, dan FK2MR. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Malang sehingga terbentuk forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Malang dan keputusan bersama tentang PRB di Kota Malang. Terselenggaranya kegiatan ini juga didukung oleh komunitas dan relawan se-Kota Malang jajaran samping serta OPD yang terkait dalam penanggulangan bencana di Kota Malang.

Kegiatan Penunjang Indikator Kedua

Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dimaksudkan untuk inisiasi pembentukan 5 (lima) kelurahan tangguh bencana sesuai dengan target indikator kinerja pada sasaran strategis misi pertama BPBD Kota Malang. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan berikut:

a. Inisiasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang dimaksudkan disini adalah dengan membentuk 5 (lima) kelurahan tangguh sesuai dengan yang telah ditargetkan pada indikator kinerja pada sasaran strategis pertama BPBD Kota Malang. Pembentukan kelurahan tangguh dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terkait peningkatan kapasitas masyarakat dan pelatihan-pelatihan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Sosialisasi dilakukan sebanyak 2 kali di masing-masing kelurahan tangguh. Setiap pelaksanaan juga melibatkan stakeholder antara lain LPMK, BKM, LINMAS, PKK dan dari unsur masyarakat itu sendiri. Pada masing-masing kelurahan tangguh dibentuk 15 orang relawan tangguh. Kader relawan di masing-masing kelurahan tersebut juga dibekali tentang pelatihan tentang kebencanaan, seperti membentuk forum pengurangan risiko bencana di masing-masing kelurahan, proses evakuasi, serta kegiatan-kegiatan seperti meminimalisir terhadap timbulnya bencana.

Dengan adanya penambahan kelurahan tangguh diharapkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana meminimalisir terjadinya risiko bencana akan semakin meningkat. Disamping itu, dalam pembentukan kelurahan tangguh BPBD juga memberikan pendampingan terhadap relawan kelurahan tangguh serta perangkat/aparatur di masing-masing kelurahan tangguh.

b. Apel Siaga Bencana

Apel siaga bencana dilaksanakan di Balai Kota Malang dengan peserta dari semua unsur *stakeholder* terkait penanggulangan bencana. Dalam apel siaga ini melibatkan kalangan relawan, PMI, Senkom Mitra POLRI, Pemerintah Kota Malang, DPRD, POLRI, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dan ormas. Dalam pelaksanaan Apel Siaga Tahun 2017 juga dilaksanakan simulasi bencana, yang diperagakan oleh para relawan, siswa-siswa sekolah dasar sampai dengan

peran aktif perguruan tinggi, khususnya tenaga kesehatan. Apel siaga ini bertujuan untuk selalu siaga terhadap bencana dari tingkat Kota sampai ke tingkat masyarakat serta meningkatkan sinergitas antar seluruh komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan dilaksanakannya apel siaga masyarakat dan beberapa elemen pendukung juga diharapkan selalu siap dan tanggap bencana apabila sewaktu-waktu terjadi bencana, baik dari segi peralatan maupun segi kapasitas masyarakat. Dalam apel siaga juga diadakan pameran/*display* peralatan-peralatan tentang kebencanaan.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terbentuknya 5 kelurahan tangguh bencana yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah. 5 kelurahan tersebut Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Kedungkandang. Diharapkan dengan adanya penambahan kelurahan tangguh semakin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana meminimalisir terjadinya risiko bencana, disamping itu juga dalam pembentukan kelurahan tangguh ini BPBD akan selalu memberikan sosialisasi terhadap relawan kelurahan tangguh serta perangkat kelurahan tangguh.

Kegiatan Penunjang Indikator Ketiga

Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penanggulangan Bencana

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan berupa Pelatihan Sistem Informasi Geografis untuk Manajemen Bencana bagi aparat BPBD Kota Malang. Pelatihan ini diikuti oleh 6 (enam) orang personil BPBD yang ruang lingkup tugasnya pada bagian perencanaan, monitoring, dan pelaksanaan pengelolaan/manajemen bencana. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola

dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki fasilitas dan kompetensi dalam melaksanakan pelatihan Sistem Informasi Geografis.

Output penting dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 (satu) kali diklat teknis bagi aparatur BPBD. Pelatihan Sistem Informasi Geografis untuk Manajemen Bencana bertujuan untuk membangun kompetensi dibidang Sistem Informasi Geografis pada umumnya dan mampu menyajikan informasi geospasial terkait kebencanaan sebagai dasar penyusunan kebijakan pada khususnya.

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang merupakan kebutuhan untuk menunjang pelayanan tanggap darurat bencana kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan bencana. Pengadaan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, melalui proses pengadaan langsung maupun e-catalog. Output penting dari kegiatan ini adalah tersedianya 27 jenis barang modal, 11 jenis pakaian kerja dan 8 jenis bahan/material.

3. Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Peraturan Walikota tentang SOP Penanggulangan Bencana di Kota Malang. Adapun penjelasan dari masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana di Kota Malang

Penyusunan Kajian Risiko Bencana dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan tim ahli dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Ruang lingkup penyusunan kajian ini adalah pengkajian tingkat ancaman bencana, analisa tingkat kerentanan terhadap bencana, analisa tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana, pengkajian tingkat

risiko bencana, penyusunan rekomendasi skala prioritas penanggulangan bencana berdasarkan tingkat risiko bencana, penyusunan buku hasil Kajian Risiko Bencana.

Output dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Kajian Risiko Bencana di Kota Malang yang dilengkapi dengan peta ancaman bencana, peta kerentanan bencana, peta kapasitas menghadapi bencana, peta risiko bencana, matriks rekomendasi skala prioritas penanggulangan bencana berdasarkan tingkat risiko bencana di wilayah kota malang. Selanjutnya kajian yang telah disusun ini dijadikan pedoman dan landasan bagi manajemen bencana pada umumnya, dan acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) pada khususnya.

b. Peraturan Walikota tentang SOP Penanggulangan Bencana di Kota Malang

Peraturan perundang-undangan untuk penanggulangan bencana merupakan landasan hukum dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Landasan hukum tersebut dalam bentuk Peraturan Walikota tentang SOP Penanggulangan Bencana di Kota Malang. Keberadaan SOP tersebut menjadi standarisasi seluruh SKPD yang terkait dalam pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat di Kota Malang. Namun pada tahun 2017 sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, karena belum ada aturan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Standar Operasional Prosedur.

4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk memfasilitasi beberapa sub kegiatan berikut.

a. Pengelolaan subdomain/website BPBD Kota Malang yang bertujuan untuk mengelola informasi publik tentang upaya pengelolaan kebencanaan di Kota Malang, sehingga masyarakat dapat mengetahui

update terkini upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di Kota Malang;

- b. Fasilitasi *monev* pengelolaan bencana yang bertujuan untuk melakukan inventarisasi dan validasi data kejadian/bencana di Kota Malang, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan;
- c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tentang pelayanan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD di Kota Malang;
- d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan BPBD Kota Malang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/ atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan BPBD Kota Malang.

5. Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Kegiatan Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk memaksimalkan koordinasi antara SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Ketua Tim Pengarah dan seluruh anggota unsur pengarah ikut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana baik pada fase pencegahan, darurat maupun pasca bencana sesuai dengan tupoksi masing-masing yang pelaksanaannya tetap berjalan secara koordinatif antar SKPD. Seluruh tim unsur pengarah juga berupaya untuk membantu BPBD dalam merangkul semua *stakeholder* terkait (masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan) agar ikut serta dalam mengantisipasi kejadian bencana di Kota Malang, terutama pada bencana-bencana yang terjadi secara periodik.

TUJUAN KEDUA

Mewujudkan sistem penanggulangan darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur

Sasaran Strategis : Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani

Dalam sasaran strategis misi kedua ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

- Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana;
- Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi; dan
- Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis kedua BPBD Kota Malang Tahun 2017 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2017
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	100%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam (100%)	< 1 jam	1,54 jam (-54%)	< 1 jam	1 Jam
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)	100%	100%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)	100%	100%

Indikator Pertama

Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target rata-rata waktu tanggap (*respond time*) bencana sebesar < 1 jam sehingga capaian kinerja dari indikator ini pada tahun 2017 adalah sebesar 100%.

Dari tabel 3.9, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya BPBD Kota Malang tampak meningkatkan kinerjanya dalam hal pencapaian *respond time* bencana. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menunjang ketercapaian kinerja, antara lain:

- Adanya dukungan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Pos Komando pengaduan bencana yang telah memiliki contact center khusus bencana, sehingga masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana dengan lebih cepat dan lebih mudah;
- Optimalnya koordinasi antar petugas/ personil yang selalu piket 24 jam setiap harinya, sehingga pejabat terkait dan petugas dapat langsung menindaklanjuti laporan kejadian bencana yang diterima;
- Optimalnya koordinasi antar instansi dan *stake holder* terkait bencana, sehingga saat terjadi bencana bukan hanya pihak BPBD yang berperan dalam mengatasi kejadian darurat.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada indikator pertama BPBD memang telah mencapai target yang ditentukan, namun di sisi lain BPBD Kota Malang masih memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain:

- Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan di lapangan pada waktu terjadi bencana masih belum memadai, baik untuk jaminan keamanan relawan maupun untuk alat bantu kerja;
- Cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Malang memicu terjadinya bencana dalam waktu bersamaan di beberapa tempat yang berbeda, sehingga dengan keterbatasan jumlah personil dan peralatan BPBD Kota Malang belum bisa melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara maksimal;
- Kurangnya kendaraan operasional untuk menuju lokasi bencana tepat waktu;
- Terdapat wilayah bencana yang lokasinya sulit dijangkau dikarenakan keterbatasan peralatan;

Indikator Kedua

Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada, jumlah korban yang seharusnya dievakuasi adalah 28 jiwa, sedangkan jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 28 jiwa. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3 dalam Tabel Rekapitulasi Data Evakuasi dan Penerima Bantuan Logistik Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2017. Adapun capaian kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dievakuasi}}{\text{Jumlah korban yang seharusnya dievakuasi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{28 \text{ jiwa}}{28 \text{ jiwa}} \times 100\% \\
 &= 100,00 \%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan pencapaian target ini tidak lepas dari peran personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang menjadi ujung tombak BPBD Kota Malang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Guna meningkatkan SDM TRC dimaksud, BPBD Kota Malang telah melaksanakan beberapa pelatihan dan simulasi bencana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian kinerja.

Dari tabel 3.9, terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi tahun 2015 dan 2016 dalam pencapaian target kinerja indikator kedua ini. Selain karena peran penting TRC, ada hal lain yang tetap ikut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator kedua pada tahun 2015, 2016 dan 2017, yaitu tingginya tingkat solidaritas masyarakat sehingga Badan Penanggulangan Daerah Kota Malang dapat terbantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada, jumlah korban bencana adalah 472 jiwa, sedangkan jumlah korban yang telah mendapatkan bantuan logistik adalah 472 jiwa. Data tersebut dapat dilihat Lampiran 3 dalam Tabel Rekapitulasi Data Evakuasi dan Penerima Bantuan Logistik Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2017. Adapun capaian kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan bantuan logistik}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{472 \text{ jiwa}}{472 \text{ jiwa}} \times 100\% \\
 &= 100,00 \%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 3.9, terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi tahun 2015 dan 2016 dalam pencapaian target kinerja indikator ketiga ini. Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan terdatanya korban dengan baik pada saat kejadian bencana dan adanya persediaan logistik yang mencukupi, sehingga bantuan logistik dapat tersalurkan kepada seluruh korban bencana.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kedua s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	100%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.10, pada semua indikator kinerja, BPBD Kota Malang dapat memenuhi pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, sehingga diharapkan di tahun-tahun mendatang target renstra ini dapat dicapai dan tetap bertahan pada kriteria yang sangat baik.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.11 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Misi Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	1.276.386.000,-	19,79%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	103.364.000,-	1,60%

	melayani	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	868.400.000,-	13,46%
--	----------	--	---------------	--------

Berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 19,79%, indikator kedua adalah 1,60%, sedangkan untuk indikator ketiga adalah sebesar 13,46%. Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 6.450.000.000,- .

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Misi Kedua

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	100%	1.276.386.000,-	1.066.544.300,-	83,56%
	Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%	103.364.000,-	80.634.000,-	78,01%
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%	868.400.000,-	627.033.671,-	72,20%
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	100%	100%	2.248.150.000,-	1.774.211.971,-	78,92%

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 83,56%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 78,01%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan

pencapaian penyerapan anggaran adalah 72,20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran.

Pada bagian program dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang dengan target sebesar 100%. Definisi korban yang tertangani adalah korban yang telah mendapatkan bantuan logistik dan korban yang berhasil dievakuasi. Realisasi target tersebut dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{\% \text{ korban yang mendapatkan bantuan logistik} + \% \text{ korban dievakuasi}}{2}$$

Dari tabel 3.12 dapat dilihat bahwa persentase korban yang mendapatkan bantuan logistik adalah 100% dan persentase korban yang dievakuasi adalah 100%. Sehingga pencapaian target indikator program sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi target} &= \frac{100\% + 100\%}{2} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari hasil realisasi target tersebut, didapatkan pencapaian kinerja program tersebut adalah 100%, sedangkan pencapaiannya adalah sebesar 78,92%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja program tersebut lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran dan termasuk dalam kriteria nilai yang sangat baik.

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	100%	83,56%	16,44%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	78,01%	21,99%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	72,20%	27,80%

Berdasarkan tabel 3.13, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 16,44%. BPBD Kota Malang telah melakukan penghematan anggaran senilai Rp. 209.841.700,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 100%.

Pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 21,99%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 22.730.000,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 100%.

Sedangkan pada indikator ketiga terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 27,80%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 241.366.329,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 100%.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran misi pertama, dilaksanakan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program ini sebagaimana telah diuraikan pada tabel 3.6. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana;
2. Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana;
3. Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana;
4. Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana;
5. Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana;
6. Pemulihan Sarana Prasarana Vital dalam Darurat Bencana.

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Indikator Pertama

Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana

1. Kegiatan Pelatihan dan Simulasi darurat Bencana

Output dari kegiatan pelatihan dan simulasi darurat bencana adalah diklat penanggulangan bencana bagi TRC & relawan yang dilaksanakan sebanyak 8 kali. Adapun uraian sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Gabungan Lintas Pelaku Tingkat Kecamatan

Peserta pelatihan di masing-masing kecamatan berjumlah 40 orang, terdiri dari unsur ASN kecamatan, unsur Puskesmas, unsur Dinas Sosial, unsur Koramil, unsur Polsekta, unsur pengusaha dan unsur Komunitas/relawan peduli penanggulangan bencana. Latihan gabungan dilaksanakan secara *outdoor* dan *indoor*. Kegiatan *outdoor* diisi dengan outbound kebencanaan dan kegiatan *indoor* diisi dengan materi manajemen penanggulangan bencana, pusdalops dan FGD dalam berbagi peran dalam penanggulangan bencana.

Latihan gabungan tingkat Kecamatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- 1) Latihan Gabungan Tingkat Kecamatan Blimbing dilaksanakan sehari pada di lapangan Sanansari (Amprong) RW 03 Kelurahan Bunulrejo;
- 2) Latihan Gabungan Tingkat Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun dilaksanakan sehari di lapangan Buring (belakang Kecamatan Kedungkandang);
- 3) Latihan Gabungan Tingkat Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru dilaksanakan sehari di lapangan Cengger Ayam (sebelah Barat Kecamatan Lowokwaru).

b. Diklat Teknis Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Kapasitas SDM

Diklat ini dilaksanakan secara berangkai dan diikuti oleh 30 orang peserta dan 10 orang pendamping selama 5 hari. Adapun uraian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Diklat Teknis Kedisiplinan

Diklat ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Kompleks Batalyon 502 Kostrad Rider Linud Jabung Kabupaten Malang, dengan materi disiplin dan rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan/kekompakan (jiwa korsa) dan loyalitas, kemampuan bekerja secara tim (networking) serta ketanggapan dan ketangkasan dalam pelaksanaan tugas

2) Peningkatan Kapasitas SDM

Sub kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang diawali dengan penyampaian materi manajemen dan berbagi peran dalam penanggulangan bencana di Aula BPBD Kota Malang. Pada hari kedua dilaksanakan perjalanan ke Kota Denpasar Provinsi Bali untuk melakukan Study komparasi ke BPBD Kota Denpasar mengenai manajemen penanganan bencana, pengelolaan pusdalops, penanganan tanggap darurat bencana serta pemulihan pasca bencana.

3) Diklat Komunikasi

Diklat komunikasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Same Hotel di Jalan Patimura No.19 Malang. Penyampaian materi pada Diklat Komunikasi tersebut oleh Narasumber dari ORARI Malang Raya. Diklat tersebut dimaksudkan agar personil BPBD Kota Malang utamanya TRC (Tim Reaksi Cepat, Tim Kaji Cepat serta Operator Pusdsalops BPBD Kota Malang dapat lebih menguasai penggunaan alat- alat komunikasi, utamanya *handy talkie*. Karena sebagai garda depan penanganan kedaruratan bencana personil BPBD dituntut untuk memahami pemakaian dan penggunaan sandi- sandi percakapan menggunakan alat komunikasi.

2. Kegiatan Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana

Keluaran (output) dari Kegiatan Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah fasilitasi uang lelah personil penanganan kedaruratan bencana untuk dapat menunjang ketercapaian target indikator kinerja kedua pada sasaran strategis kedua BPBD Kota Malang. Personil penanganan kedaruratan terdiri dari 17 orang TRC, 4 orang operator Pusdalops, 9 orang TRC Kaji Cepat. Selain fasilitasi uang lelah personil penanganan kedaruratan bencana, kegiatan ini juga memfasilitasi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan kedaruratan dan Pusdalops PB. Adapun penjelasannya adalah berikut:

a. Fasilitasi Tim Reaksi Cepat, Tim Kaji Cepat dan Operator Pusdalops PB

Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah pelaksana tugas lapangan yang merupakan ujung tombak BPBD Kota Malang dalam menghadapi situasi tanggap darurat. TRC bertugas untuk mendirikan keposkoan siaga tanggap darurat bencana dan melakukan tindakan kedaruratan saat/ setelah kejadian bencana termasuk mendukung pemberian bantuan dan pemulihan sarpras vital pada masa tanggap darurat bencana. Jumlah anggota TRC sebanyak 17 orang.

Sedangkan Tim Kaji Cepat (TKC) bertugas menilai kerusakan dan kerugian saat/ sesudah kejadian bencana serta penggalian informasi atau *rapid assessment* (kaji cepat) yang bersifat baku dan efektif. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam memberikan gambaran atas cakupan lokasi, kerusakan yang terjadi, jumlah korban, perubahan fungsi sosial masyarakat, dan kebutuhan korban dan masyarakat terdampak. TKC juga bertugas melakukan pendampingan awal kepada korban bencana serta menyusun laporan hasil kaji cepat kejadian bencana. Tim Kaji Cepat bekerja bertugas selama 24 jam per hari yang terbagi 3 waktu jaga/piket masing-masing seorang per 8 jam dimulai jam 07.00 dan seorang istirahat (off). Jumlah anggota TKC sebanyak 9 orang.

Selain anggota TRC an TKC, BPBD Kota Malang memfasilitasi 4 (empat) orang operator Pusdalops PB. Petugas Operator Pusdalops bertugas selama 24 jam per hari yang terbagi 3 waktu jaga/piket masing-masing seorang per 8 jam dimulai jam 07.00 dan seorang istirahat (off). Tugas dan fungsi Pusdalops PB antara lain sebagai pengolahan data informasi kebencanaan dan kejadian serta menyusun bahan pelaporan baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat pusat/nasional melalui media teknologi informasi dan manual.

b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk Pusdalops PB

Pengadaan peralatan dan perlengkapan dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja dari Pusdalops PB. Pengadaan yang dilakukan antara lain pengadaan komputer PC, televisi, meja kerja, proyektor, instalasi listrik dan vacuum cleaner untuk ruangan Pusdalops PB.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil kinerja yang dicapai, antara lain:

- Kurang meratanya SDM pelaku penanganan darurat bencana;
- Tingkat bencana yang terjadi di Kota Malang dengan intensitas tinggi terjadi pada waktu musim penghujan, dengan kerawanan banjir, tanah longsor, pohon tumbang, luapan air dan genangan air. Hal ini berimbas pada tingginya intensitas relawan untuk berada di lapangan. Namun hal ini tidak diimbangi dengan jaminan yang memadai bagi relawan;
- Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan di lapangan pada waktu terjadi bencana masih belum memadai baik untuk relawan yang digunakan sebagai alat bantu kerja;
- Terbatasnya jumlah tenaga teknis kebencanaan serta wilayah bencana dengan lokasi yang sulit dijangkau dengan peralatan yang belum maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPBD Kota Malang memberikan beberapa rekomendasi berikut:

- Perlunya adanya jaminan pada relawan berupa asuransi keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan tambahan uang lelah yang sesuai bagi relawan bencana;
- Perlunya penambahan sarana prasarana alat bantu kerja dan penunjang keselamatan kerja bagi relawan.

Indikator Kedua

Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

1. Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana

Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana dimaksudkan untuk memfasilitasi jasa sewa alat berat untuk keperluan darurat jika terjadi bencana yang sifatnya *massive* dan rapat/pertemuan untuk menyusun rencana kebutuhan barang sarpras dan untuk melakukan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara mandiri. Namun dalam pelaksanaannya pengadaan jasa sewa alat belum dilaksanakan dikarenakan tidak ada bencana yang sifatnya *massive*.

2. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana setelah pelaksanaan Apel Siaga Bencana di Halaman dan jalan depan Balaikota Malang dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) tahun 2017 pada tanggal 26 April 2017. Kegiatan ini melibatkan lebih 650 orang personil dari berbagai unsur antara lain unsur BPBD, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, TNI, POLRI, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, PMI, Pramuka, Sekolah Menengah, Komunitas/ Relawan Peduli Penanganan Bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kerja sama lintas pelaku dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

1. Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan logistik korban bencana pada masa darurat bencana. Penyediaan logistik ini berupa bahan sembako dan bangunan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan. b.

Pengadaan bahan baku bangunan untuk penanggulangan bencana baik untuk korban bencana maupun pendukung kegiatan berupa: Seng Gelombang, Sealant, Paku Seng segala ukuran, Paku Kayu (Biasa), Kawat Bendrat, Besi Galvalum C Canal, Spandex, Kawat Galvanis, Triplek, Kalsiboard, Kayu Usuk, Batu Bata, Balok, Tanah Cuttle, Pasir Merah, Pipa Paralon, Knee type L, Lem PVC, macam- macam baut, Bambu Bongkolan, Batu Kali, Gedek Bambu, Kapur, Semen, Sesek (anyaman bambu)

Namun demikian logistik yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dasar bencana, yaitu pangan, sandang, air bersih serta sanitasi, sehingga di tahun yang akan datang perlu pengaturan tentang pengadaan logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar dimaksud.

2. Kegiatan Pemulihan Sarana Prasarana Vital dalam Darurat Bencana

Kegiatan ini diawali dengan serangkaian beberapa rapat koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang melibatkan lintas pelaku dalam antara lain unsur OPD terkait, unsur kelurahan dan unsur masyarakat lokasi kejadian bencana yang melibatkan dua orang tenaga ahli penyusun rencana operasi tanggap darurat. Dalam kegiatan ini dilaksanakan perbaikan darurat di dua titik sebagai berikut.

- 1) Perbaikan Dinding Penahan Tanah di lokasi kejadian tanah longsor di belakang rumah Bu Seno dengan alamat Jalan Muharto VII RT 08 RW 07 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang. Paket pekerjaan konstruksi perkuatan tebing (Revetment) terdiri dari: a. Pekerjaan

Persiapan meliputi: Pembersihan lokasi, pengukuran dan bouplank, mobilisasi/ lansiran material, dokumentasi dan laporan. b. Pekerjaan Tanah meliputi: Galian tanah keras, pembuangan tanah dan urugan tanah kembali. c. Pekerjaan Pasangan meliputi: pasangan batu kali (1:3), pasangan bata merah (1:3), plesteran tebal 1,5 cm, Acian, Benangan. d. Pekerjaan Beton meliputi: Strous beton bertulang, footplat beton bertulang, kolom beton bertulang 25/30, balok beton bertulang 25/30, beton bertulang saluran air U 40/40 dan beton bertulang dinding penahan tanah.

- 2) Pemasangan Dinding Penahan Tanah berupa bronjong batu di lokasi kejadian tanah longsor disertai robohnya rumah Bapak Sunardi, dengan alamat Jalan Hasanudin Belakang Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen. Paket pekerjaan konstruksi bronjong Jl. Hasanudin Kelurahan Samaan terdiri dari: a. Pekerjaan Persiapan meliputi: pembersihan lokasi, pengukuran dan pemasangan bouplank, pembongkaran dinding existing, mobilisasi lansiran material, dokumentasi dan pelaporan. b. Pekerjaan Tanah meliputi: galian tanah, pembuangan tanah, pembuangan bongkotan, urugan tanah dan timbunan tanah dipadatkan secara manual. c. Pekerjaan Pasangan meliputi: pasangan bronjong batu kali.

TUJUAN KETIGA

Menormalisasikan kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana

Sasaran Strategis : Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik

Dalam sasaran strategis misi ketiga ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

1. Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direhabilitasi Pascabencana;
2. Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direkonstruksi Pascabencana; dan
3. Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik.

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis ketiga BPBD Kota Malang Tahun 2017 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2017
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	25%	31,5%	126%
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	25%	37,5%	150%
		Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	85,3%	170,6%

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	25%	28,6% (114,4%)	25%	25% (100%)	25%	31,5% (126%)
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	25%	- (0%)	25%	50% (200%)	25%	37,5% (150%)

	dan pendampingan non-fisik	Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	- (0%)	50%	34,53% (69,06%)	50%	85,3% (170,6%)
--	----------------------------	--	-----	-----------	-----	--------------------	-----	-------------------

Indikator Pertama

Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direhabilitasi Pascabencana

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator pertama dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 126%. Dari data yang ada didapatkan jumlah sarana prasarana publik yang rusak terkena bencana dan memerlukan rehabilitasi adalah 19 lokasi, sedangkan jumlah yang telah direhabilitasi adalah 6 lokasi. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4 dalam tabel Inventarisasi Rehabilitasi Kota Malang Tahun Anggaran 2017. Adapun realisasi target indikator kinerja pada indikator pertama ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi target} &= \frac{\text{Jumlah sarpras publik yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah sarpras publik yang perlu direhabilitasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{6 \text{ lokasi}}{19 \text{ lokasi}} \times 100\% \\
 &= 31,5 \%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 3.15, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2016, pada tahun 2017 BPBD mengalami peningkatan capaian kinerja dari 100% menjadi 126%. Keberhasilan peningkatan pencapaian target ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang (DPUPR) dan kepedulian dari masyarakat Kota Malang sendiri untuk menindaklanjuti pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

Indikator Kedua**Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direkonstruksi Pascabencana**

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 150%. Dari data yang ada didapatkan jumlah sarana prasarana publik yang rusak terkena bencana dan memerlukan rekonstruksi adalah 8 lokasi, sedangkan jumlah yang telah direkonstruksi adalah 3 lokasi. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5 dalam tabel Inventarisasi Rekonstruksi Kota Malang Tahun Anggaran 2017. Adapun realisasi target indikator kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi target} &= \frac{\text{Jumlah sarpras publik yang direkonstruksi}}{\text{Jumlah sarpras publik yang perlu direkonstruksi}} \times 100\% \\
 &= \frac{3 \text{ lokasi}}{8 \text{ lokasi}} \times 100\% \\
 &= 37,5 \%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 3.15, jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 memang terdapat perbedaan pencapaian kinerja indikator kedua, dari pencapaian 200% menjadi 150%. Namun pada tahun 2017 BPBD Kota Malang justru melaksanakan lebih banyak rekonstruksi daripada tahun 2016. Jika dilihat kembali pada data capaian 2016, BPBD Kota Malang melaksanakan rekonstruksi pada 1 lokasi saja (dengan total lokasi yang harus direkonstruksi sebanyak 2 titik), namun pada tahun 2017 BPBD Kota Malang telah melaksanakan rekonstruksi pada 3 lokasi. Peningkatan jumlah lokasi pembangunan ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana publik yang rusak bencana pada tahun anggaran 2017. Selain itu, keberhasilan pencapaian kinerja ini juga didukung dengan tingginya gotong-royong warga sekitar yang sangat berperan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 170,6%. Dari data yang ada didapatkan jumlah korban bencana di Kota Malang tahun 2017 adalah 472 jiwa, sedangkan jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan non fisik adalah 403 jiwa. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6 dalam tabel Inventarisasi Pendampingan Non Fisik pada Korban Bencana di Kota Malang Tahun Anggaran 2017. Adapun realisasi target indikator kinerja pada indikator ketiga ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi target} &= \frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan non fisik}}{\text{Jumlah korban bencana di Kota Malang}} \times 100\% \\
 &= \frac{403 \text{ jiwa}}{472 \text{ jiwa}} \times 100\% \\
 &= 85,3 \%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 3.15, pada tahun 2017 BPBD Kota Malang mengalami peningkatan pencapaian daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan kemajuan yang cukup signifikan dalam pencapaian kinerja indikator ketiga, yaitu dari 0% di tahun 2015, 69,06% di tahun 2016, dan 170,6% di tahun 2017. Peningkatan kinerja ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan pendampingan non fisik bagi korban bencana di Kota Malang tahun 2017, adanya koordinasi dengan pihak kelurahan maupun keterlibatan langsung dari masyarakat, serta perencanaan yang telah disusun secara sistematis.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Ketiga s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	25%	31,5%	126%
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	25%	37,5%	150%
		Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	85,3%	170,6%

Berdasarkan tabel 3.16, pada indikator kinerja pertama terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mencapai target Renstra dengan sangat baik bahkan pada indikator kedua BPBD Kota Malang dapat melebihi angka yang ditargetkan oleh Renstra. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan BPBD Kota Malang dapat mencapai target ini dan tetap bertahan pada kriteria nilai yang sangat baik.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.17 Alokasi per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	297.377.000	4,61%
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	352.148.000	5,46%
		Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	385.060.000	5,97%

Berdasarkan tabel 3.17 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 4,61%, untuk indikator kedua adalah 5,46%, dan untuk indikator ketiga adalah 5,97. Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 6.450.000.000,- .

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Ketiga

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	25%	31,5%	126%	297.377.000	265.834.157	89,39%
	Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	25%	37,5%	150%	352.148.000	346.207.500	98,31%
	Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	85,3%	170,6%	385.060.000	321.911.300	83,60%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase pulihnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	50%	92,65%	185,3%	1.331.962.000	1.199.787.114	90,08%

Berdasarkan tabel 3.18 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 126% dan pencapaian penyerapan anggaran juga 89,39%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dari pencapaian anggaran. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 150% dan pencapaian penyerapan anggaran adalah 98,31%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 170,6% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 83,60%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran.

Pada bagian program dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase pulihnya kualitas hidup masyarakat pascabencana dengan target sebesar 50%. Pulihnya kualitas hidup masyarakat pascabencana dapat dilihat dari pemberian bantuan logistik dan pendampingan yang dilakukan terhadap korban bencana. Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui persentase korban yang mendapatkan bantuan logistik adalah sebesar 100%, sedangkan persentase korban yang mendapatkan pendampingan non fisik adalah sebesar 85,3%. Realisasi target kinerja program dihitung secara sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Realisasi target} &= \frac{\% \text{ korban yang mendapatkan bantuan logistik} + \% \text{ korban mendapat pendampingan non fisik}}{2} \\ &= \frac{100 + 85,3}{2} \\ &= 92,65\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Persentase pulihnya kualitas hidup masyarakat pascabencana adalah 92,65%. Dari hasil realisasi target tersebut, didapatkan pencapaian kinerja program tersebut adalah 185,3%, sedangkan pencapaian anggarannya adalah sebesar 90,08%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja program tersebut lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran dan termasuk dalam kriteria nilai yang sangat baik.

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	126%	89,39%	36,61%
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	150%	98,31%	51,69%
		Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	170,6%	83,60%	87%

Berdasarkan tabel 3.19, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 36,61%. Pada indikator pertama BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 31.542.843,- , dan dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 126%. Pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 51,69%. Dalam kinerja indikator kedua BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 5.940.500,- , dan dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 150%. Pada indikator ketiga terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 87%. Dalam kinerja indikator ketiga BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 63.148.700,- , dan dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 170,6%.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran misi ketiga, dilaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana serta Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program dimaksud telah diuraikan pada tabel 3.18. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Publik yang Rusak Pasca Bencana;
3. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Publik yang Rusak Pascabencana; dan
4. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana;
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat.

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Indikator Pertama

Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direhabilitasi Pascabencana

1. Kegiatan Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca dimaksudkan untuk memfasilitasi pengkajian kebutuhan pasca bencana, memfasilitasi sosialisasi hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, serta memfasilitasi proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RENAKSI RR PASNA). Penjelasan secara rinci sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)

Memfasilitasi kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA) sebagai tindak lanjut Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 dan Perka BNPB No. 15 Tahun 2011. Dokumen JITU-PASNA tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Rangkaian kegiatan dimulai dari Asessment Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) yang dilakukan Petugas Non ASN selaku penganalisa Data Pasca Bencana dengan terjun langsung ke lokasi bencana. Tujuannya untuk melakukan analisis, kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, peningkatan resiko serta kajian akibat dan kajian dampak dari kejadian bencana. Pembahasan hasil A2R2 dilakukan Timker JITU-PASNA melalui rapat kerja di ruang rapat BPBD Kota Malang.

b. Fasilitasi Sosialisasi Hasil Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Hasil Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA) terhadap Kejadian Bencana di Kota

Malang yang diselenggarakan di Hotel Ollino Garden Jalan Aries Munandar 41-45 dengan peserta sebanyak 120 orang yang terdiri dari Timker JITU-PASNA, unsur SKPD teknis terkait, perwakilan masyarakat pada lokasi bencana dan unsur swasta. Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Setda Kota Malang. Sedangkan narasumber dan moderator berasal dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Barenlitbang Kota Malang, Dinas Sosial dan DPUPR Kota Malang.

c. **Fasilitasi Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RENAKSI RR PASNA)**

Memfasilitasi proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RENAKSI RR PASNA) sebagai hasil tindak JITU PASNA dengan lokasi yang telah ditetapkan sebanyak 10 lokasi. Lokasi-lokasi tersebut antara lain : Jalan Kemirahan Gg 3 Kelurahan Purwodadi, Jalan Bareng Kartini RT 02 RW 08 kelurahan Kauman, Jalan Simping Sukun Timur Gg Duku RT 02 RW 04 Kelurahan Sukun, Jalan Tlogomas RT 03 RW 02 Kelurahan Tlogomas, Jalan S. Parman Kelurahan Purwantoro, Jalan Muharto Gg 3 Kelurahan Kotalama, Jalan Ngaglik Gg II RT 09 RW 01 Kelurahan Sukun, Jalan Tlogowarna RT 5 RW 6 Kelurahan Tlogomas, Jalan Muharto Gg V Kelurahan Kotalama dan Jalan Arif Margono Gg 10 RT 7 RW 7 Kelurahan Kasin.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) yang selanjutnya dikirimkan kepada SKPD terkait untuk dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Kurang adanya kepastian terkait pelaksanaan Dokumen Hasil JITU-PASNA oleh SKPD terkait dikarenakan belum menjadi rujukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

- Legitimasi (kekuatan) hukum hasil JITU-PASNA yang belum jelas dan mengikat, hal ini dikarenakan belum maksimalnya koordinasi antar Pemangku kepentingan dan belum memiliki pemahaman yang sama mengenai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Malang.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana adalah pelaksanaan rehabilitasi di dua titik lokasi dan penyusunan satu dokumen perencanaan dan gambar teknis rehabilitasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Fasilitasi Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah

- 1) Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Jalan Bareng Taman Bunga RT 05 RW 03 kelurahan Bareng atas nama Bapak Nomo

Pekerjaan Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Lurah Bareng perihal laporan kejadian tanah longsor di rumah Ibu hariyama dan bapak Muchsin yang beralamat di Jalan Bareng Taman Bunga No. 16 dan 18. Proses kegiatan dilakukan dengan melakukan Assesment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi. Kemudian proses berikutnya membuat penyusunan perencanaan teknis yang dilanjutkan dengan penetapan Rencana Kebutuhan pembangunan dinding penahan. Proses pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 21 Oktober s/d 6 November 2017.

- 2) Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Jalan Abimanyu Rt 02 RW 03 Kelurahan Polehan

Pekerjaan Rehabilitasi berdasarkan pada Dokumen JITU-PASNA tahun 2016. Lokasi Jalan Abimanyu RT 02 RW 03 Kelurahan Polehan masuk kedalam 11 lokasi yang masuk dalam perencanaan. Proses pengerjaan melibatkan pihak selama 21 (Dua Puluh Satu) hari.

b. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Gambar Teknis

Penyusunan dokumen perencanaan dan gambar teknis pada kegiatan Rehabilitasi berdasarkan laporan kejadian bencana dan laporan kaji cepat. Tahapan awal berupa Assasment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi-lokasi bencana yang ada. Setelah itu ditetapkan dalam rapat bidang rehabilitasi guna menetapkan lokasi yang akan ditindak lanjuti dengan penyusunan perencanaan dan gambar teknis dengan tenaga Ahli. Dari hasil kegiatan telah disusun 13 dokueman perencanaan meliputi :

- 1) Jalan Aris Munandar VII No. 12 RT 05 RW 04 kelurahan Kiduldalem;
- 2) Belakang Gedung Balai RW 02 Kelurahan Oro-Oro Dowo;
- 3) Jalan Arif Margono Gg. 10 RT 7 RW 7 kelurahan Kasin;
- 4) Jalan Kepuh 10 RT 08 RW 05 Kelurahan Bandungrejosari;
- 5) Jalan Lenten. S. Parman Gg. II RT 10 RW 18 kelurahan Purwantoro;
- 6) Jalan Serayu Selatan RT 05 RW 02 Kelurahan Bunulrejo;
- 7) Jalan Bareng Kartini RT 02 RW 08 Kelurahan Kauman;
- 8) Jalan Raya Gadang gang 5 Kelurahan Gadang;
- 9) Jalan Tanjung gang 5B RT 03 RW 13 Kelurahan Tanjungrejo;
- 10) Jalan Simpang Sukun Timur gang Duku RT 02 RW 04 Kelurahan Sukun;
- 11) Jalan Bareng Kartini gang 3C RT 4 RW 8 Kelurahan Kauman;
- 12) Jalan Simpang Mega Mendung RW 08 Kelurahan Pisang candi dan Jalan Ngaglik gang 3 Kelurahan Purwodadi.

Indikator Kedua

Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana

1. Kegiatan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana adalah pelaksanaan rekosntruksi di dua titik

lokasi dan penyusunan satu dokumen perencanaan dan gambar teknis rekonstruksi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Fasilitas Rekonstruksi Dinding Penahan Tanah

1) Rekonstruksi Dinding Penahan Tanah di Jalan Simpang Sukun Timur RT 13 RW 04 Kelurahan Sukun

Pembangunan dinding penahan ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Kaji Cepat perihal laporan Tanah Longsor yang mengakibatkan kerusakan pada rumah a.n Julaikha. Kerusakan sepanjang 8 meter dan ketinggian tanah 7 meter. Proses kegiatan dimulai dengan menindaklanjuti laporan Kaji Cepat. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan A2R2 pada lokasi bencana. Hasil A2R2 kemudian dibahas dalam rapat internal Bidang RR dan ditetapkan untuk dibuatkan perencanaan berupa *DED (Detail Engineering Design)* pada lokasi tersebut. DED dibuat oleh tenaga ahli teknik sipil dan gambar teknis. Hasil penghitungan kebutuhan pembangunan dinding penahan tanah. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) hari.

2) Rekonstruksi Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Jalan Candi 3 RT 11 RW 3 Kelurahan Karangbesuki

Pembangunan dinding penahan ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Kaji Cepat perihal laporan Tanah Longsor yang mengakibatkan material tanah yang longsor menimbun badan jalan. Dinding penahan tidak sepenuhnya mengcover tebing, panjang tebing 30 meter dan hanya memiliki dinding penahan sepanjang 10 meter. Proses kegiatan dimulai dengan menindaklanjuti laporan Kaji Cepat. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan A2R2 pada lokasi bencana. Hasil A2R2 kemudian dibahas dalam rapat internal Bidang RR dan ditetapkan untuk dibuatkan perencanaan berupa *DED (Detail Engineering Design)* pada lokasi tersebut. DED dibuat oleh tenaga ahli teknik

sipil dan gambar teknis. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari.

b. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Gambar Teknis

Rekonstruksi berdasarkan laporan kejadian bencana dan laporan kaji cepat. Tahapan awal berupa Assasment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi-lokasi bencana yang ada. Setelah itu ditetapkan dalam rapat bidang RR guna menetapkan lokasi yang akan ditindak lanjuti dengan penyusunan perencanaan dan gambar teknis dengan tenaga ahli, Juru dan Suveyor. Dari hasil kegiatan telah disusun 14 dokuman perencanaan meliputi :

- 1) Jalan Kemirahan gang 3 Kelurahan Purwodadi;
- 2) Jalan Supriadi gang 7 Kelurahan Sukun;
- 3) Jalan Abimanyu RT 02 RW 03 Kelurahan Polehan;
- 4) Jalan Bareng Taman Bunga Rt 05 RW 03 Kelurahan Bareng;
- 5) Jalan Ikan Piranha Atas RT 02 RW 03 Kelurahan Tunjungsekar;
- 6) Jalan Tlogosuryo RT 03 RW 02 Kelurahan Tlogomas;
- 7) Jalan Candi 3 RT 11 RW 03 Kelurahan Karangbesuki;
- 8) Jalan Simpang Sukun Timur RT 13 RW 04 Kelurahan Sukun;
- 9) Jalan Ki Ageng Gribig RT 07 RW 01 Kelurahan Kedungkandang;
- 10) Jalan Kebalen Wetan II/22 RT 06 RW 05 Kelurahan Kotalam;
- 11) Jalan Muharto gang 7 RT 08 RW 07 Kelurahan Kotalama;
- 12) Jalan Simpang LA Sucipto gang Makam Kelurahan Pandanwangi;
- 13) Jalan Muharto gang 3 Kelurahan Kotalama;
- 14) Perbatasan RT 13 dan 14 Kelurahan Bareng.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik

1. Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah satu dokumen kajian upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan psikologis pascabencana yang telah disusun. Adapun proses penyusunannya adalah sebagai berikut.

a. Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Psikologis Masyarakat Terdampak Bencana di Wilayah RW 08, RW 09 dan RW 10 Kelurahan Kotalama

Sub kegiatan ini meliputi survei kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan psikologis masyarakat terdampak bencana. Hasil survei akan menjadi bahan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang akan menjadi dasar penyusunan Dokumen Hasil Pengkajian Kebutuhan Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Psikologis Masyarakat Pasca Bencana. Bidang RR bekerja sama dengan Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya (PSKK UB).

Sub kegiatan ini diawali dengan pembahasan substansi kajian dalam rakor Tim Ahli Pengkajian di Ruang Rapat BPBD Kota Malang. Kemudian diadakan rapat lanjutan guna pembahasan Laporan Pendahuluan, Penetapan lokus, kebutuhan tenaga surveyor dan indikator. Dilanjutkan Sosialisasi Survei Pengkajian Kebutuhan Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana di RW 8, RW 9 dan RW 10 Kelurahan Kotalama yang diadakan di Gedung Pertemuan kantor Kelurahan Kotalama. Survei dilaksanakan pada melibatkan 368 responden. Pelaksanaan survei juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengetahuan kebencanaan. Khususnya di kawasan Kelurahan Kotalama yang termasuk beresiko tinggi terutama bencana tanah longsor dan banjir.

Hasil survei ditindaklanjuti dengan Focus Group Discussuin (FGD) yang melibatkan Tim Ahli dari PSKK UB, Pihak Kelurahan Kotalama, BPBD Kota Malang dan unsur masyarakat yang mewakili. Hasil FGD menjadi salah satu baha dalam penyusunan laporan akhir kegiatan. Laporan Akhir berupa Kajian tentang Kebutuhan Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Psikologis pasca bencana yang akan menjadi dasar penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tahun anggaran 2018.

- b. Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Psikologis Masyarakat Terdampak Bencana melalui Kerja Sama dengan Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya (PSKK UB)

Fasilitasi pengkajian kebutuhan pemulihan sosial ekonomi dan psikologis masyarakat terdampak bencana dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya (PSKK UB). Tenaga Ahli a.n Dr. Eng. Turniningtyas Ayu Rachmawati, ST, MT, Iwan Nurhadi, S.sos, M.Si, I Wayan Suyadnya, M.Sos, Dr. Rer. Pol. Wildan Syafitri, SE, ME dan Dhara Kusuma Wardhani. Tenaga Surveyor a.n Kusuma Pradana Ramadani, S.Sos, Afriza Eka Satria Pratama, ST, Muhammad Suprayogi Setiawan, ST, Zarotul Laili dan Ayuni Laily Subari. Data diolah seorang pengolah Data a.n Dhara Kusuma, ST. Kegiatan Pemulihan sosial ekonomi dan psikologis dilaksanakan pada bulan April-Mei 2017.

2. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Keluaran penting (*output*) dari kegiatan ini adalah 35 kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan melalui pelatihan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain melaksanakan pelatihan, BPBD Kota Malang juga melaksanakan rehabilitasi dinding penahan tanah dan

rekonstruksi saluran air dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Fasilitasi pelatihan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) Paket Usaha di RW 07 dan RW 08 Kelurahan Bareng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Survei Kegiatan Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana melalui metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Focus group Discussion (FGD) di RT 01 dan RT 02 RW 07 dan RT 13 dan RT 14 RW 08 Kelurahan Bareng. Paket usaha yang dimaksud adalah Pelatihan bagi Kelompok Usaha Makanan Khas Tradisional Khas Bareng Getuk, Kelompok Usaha minuman Tradisional (Jamu), kelompok usaha Konveksi Sablon, kelompok Usaha Konveksi Jahit dan Kelompok Usaha Budidaya Jamur Tiram. Proses awal ialah melakukan *Profilling* nama-nama peserta Kelompok Usaha Masyarakat oleh fasilitator pendamping sosial dan ekonomi masyarakat.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bekerja sama dengan Lembaga Pelayanan Publik Kusuma Negara (LPPKN) selaku pelaksana kegiatan. Kerjasama diawali dengan rapat persiapan pelaksanaan pelatihan yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat peserta pelatihan di balai RW 07 Kelurahan Bareng. Peserta Sosialisasi meliputi unsur BPBD, Pihak LPPKN, unsur Kelurahan Bareng dan masyarakat peserta sosialisasi. Dalam sosialisasi ini diinformasikan jadwal pelaksanaan pelatihan.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Ekonomi masyarakat dilaksanakan tanggal 27 s/d 29 Maret, dan 31 maret 2017 di Gedung Balai RW 07 Kelurahan Bareng kemudian ditindak lanjuti dengan kunjungan lapangan ke industri Jamur Tiram dan minuman segar di Kabupaten Blitar dan Industri Konveksi di Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 2 April 2017. Peserta Pelatihan sebanyak 35 orang yang terbagi kedalam 5 (lima) Kelompok Usaha. Pelatihan ini juga

memberikan bantuan peralatan ke setiap kelompok usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

- b. Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Jalan Piranha Atas Blok C RT 02 RW 03 Kelurahan Tunjungsekar atas nama Bapak Sugeng

Pekerjaan Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut dari Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA) Tahun 2017. Proses kegiatan dilakukan dengan melakukan Assesment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi. Kemudian proses berikutnya membuat penyusuna perancangan teknis oleh konsultan bersama 6 (enam) lokasi lainnya. Proses pekerjaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- c. Rekonstruksi Saluran Air di perbatasan RT 13 dan RT 14 RW Kelurahan Bareng

Pekerjaan Rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA) Tahun 2017. Proses kegiatan dilakukan dengan melakukan Assesment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi. Kemudian proses berikutnya membuat penyusuna perancangan teknis oleh konsultan bersama 6 (enam) lokasi lainnya. Proses pekerjaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mendapatkan pendanaan dari dua sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Alokasi dana APBN untuk BPBD Kota Malang tahun 2017 melalui Dana Siap Pakai (DSP) adalah sebesar Rp. 120.000.000,- . Sedangkan alokasi anggaran dari

APBD tahun 2017 adalah sebesar Rp. 8.995.289.600,-. Uraian penyerapan dana untuk masing-masing sumber dana adalah sebagai berikut:

1. Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Anggaran APBD untuk BPBD Kota Malang tahun 2017 adalah sebesar Rp. 8.995.289.600,- terdiri dari belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 2.545.289.600,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 6.450.000.000,-. Realisasi pengeluaran belanja APBD 2017 adalah sebesar Rp. 7.816.107.533,- (86,89%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.338.239.556,- (91,86%) dan belanja langsung Rp. 5.477.867.977,- (84,93%). Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.20.

**Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana APBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2017**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI		Sisa (Rp)
			Nominal (Rp)	%	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.545.289.600,00	2.338.239.556,00	91,86	207.050.044,00
1	Gaji dan Tunjangan	1.340.994.100,00	1.217.663.420,00	59,45	123.330.680,00
2	Tambahan Penghasilan	1.204.295.500,00	748.740.125,00	98,55	83.719.364,00
II	BELANJA LANGSUNG	6.450.000.000,00	5.477.867.977,00	84,93	972.132.023,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		611.691.000,00	592.457.929,00	96,86	19.233.071,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	13.800.000,00	12.440.000,00	90,14	1.360.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.200.000,00	54.743.196,00	86,62	8.456.804,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	24.988.000,00	99,95	12.000,00
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00	3.920.000,00	98,00	80.000,00

5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	165.915.000,00	160.134.330,00	96,52	5.780.670,00
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	2.700.000,00	67,50	1.300.000,00
7	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00	24.013.500,00	96,05	986.500,00
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	290.776.000,00	289.553.903,00	99,58	1.222.097,00
9	Penyediaan jasa pengamanan kantor	20.000.000,00	19.965.000,00	99,83	35.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.331.374.000,00	1.112.935.420,00	83,59	218.438.580,00
1	Pembangunan gedung kantor	262.429.000,00	95.150.000,00	36,26	167.279.000,00
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	157.500.000,00	154.920.000,00	98,36	2.580.000,00
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	102.425.000,00	99.885.000,00	97,52	2.540.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	28.100.000,00	93,67	1.900.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	151.000.000,00	131.385.400,00	87,01	19.614.600,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	4.309.000,00	43,09	5.691.000,00
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	618.020.000,00	599.186.020,00	96,95	18.833.980,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		90.000.000,00	89.916.950,00	99,91	83.050,00
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penanggulangan Bencana	90.000.000	89.916.950,00	99,91	83.050,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		427.400.000,00	389.298.500,00	91,09	38.101.500,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60.000.000,00	59.600.000,00	99,33	400.000,00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	71.900.000,00	67.845.500,00	94,36	4.054.500,00
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.500.000,00	6.922.000,00	92,29	578.000,00
4	Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang - undangan untuk Penanggulangan Bencana	210.000.000,00	181.500.000,00	86,43	28.500.000,00
5	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana	50.000.000,00	48.431.000,00	96,86	1.569.000,00
6	Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana	28.000.000,00	25.000.000,00	89,29	3.000.000,00

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		706.800.000,00	585.094.250,00	82,78	121.705.750,00
1	Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko Bencana	75.000.000,00	35.615.000,00	47,49	39.385.000,00
2	Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana	75.500.000,00	37.230.000,00	49,31	38.270.000,00
3	Pemantauan untuk pencegahan bencana	76.275.000,00	74.250.000,00	97,35	2.025.000,00
4	Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Pengurangan Risiko Bencana	42.500.000,00	41.207.500,00	96,96	1.292.500,00
5	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	437.525.000,00	396.791.750,00	90,69	40.733.250,00
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		2.248.150.000,00	1.774.211.971,00	78,92	473.938.029,00
1	Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana	428.236.000,00	394.390.000,00	92,10	33.846.000,00
2	Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana	848.150.000,00	672.154.300,00	79,25	175.995.700,00
3	Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana	30.000.000,00	7.270.000,00	24,23	22.730.000,00
4	Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana	73.364.000,00	73.364.000,00	100,00	-

5	Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana	490.000.000,00	447.556.671,00	91,34	42.443.329,00
6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	378.400.000,00	179.477.000,00	47,43	198.923.000,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		1.034.585.000,00	933.952.957,00	90,27	100.632.043,00
1	Analisis, monitoring dan evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	140.614.000,00	112.017.000,00	79,66	28.597.000,00
2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana	156.763.000,00	153.817.157,00	98,12	2.945.843,00
3	Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana	352.148.000,00	346.207.500,00	98,31	5.940.500,00
4	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pascabencana	115.110.000,00	107.274.500,00	93,19	7.835.500,00
5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	269.950.000,00	214.636.800,00	79,51	55.313.200,00
TOTAL		8.995.289.600,00	7.816.107.533,00	86,89	1.179.182.067,00

2. Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional)

Dana APBN yang dimanfaatkan oleh BPBD Kota Malang adalah Dana Siap Pakai (DSP). DSP adalah dana yang tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu hingga tanggap darurat bencana berakhir. Prosedur penggunaan DSP ini dimulai dengan pengusulan anggaran oleh BPBD pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang dirinci untuk berbagai alokasi anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya berdasarkan usulan tersebut, pada saat kondisi tanggap darurat bencana BNPB menyalurkan DSP langsung kepada rekening BPBD.

Usulan DSP yang disetujui untuk Kota Malang tahun 2017 adalah senilai Rp.120.000.000,-. Dana ini dialokasikan untuk dua kegiatan, yaitu Aktivasi pos komando dan Pengadaan Paket Sembako. Anggaran pagu yang terserap untuk BPBD Kota Malang adalah Rp.120.000.000,- (100%). Secara rinci penyerapan DSP dapat dilihat pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21. Realisasi Penyerapan Dana APBN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2017**

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			Nominal (Rp)	%	
1.	Aktivasi pos komando (Posko)	80.000.000,-	80.000.000,-	100	-
2.	Pengadaan 200 (dua ratus) Paket Sembako (@ Rp. 200.000,-)	40.000.000,-	40.000.000,-	100	-
TOTAL		120.000.000,-	120.000.000,-	100	-